

BAB II

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Tinjauan penelitian Terdahulu

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan merupakan sarana bagi perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang dibayarkan seminimal mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan dengan strategi perpajakan yang benar (Pohan, 2013). Strategi perencanaan pajak bisa dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penyelundupan pajak (*tax evasion*). Walaupun kedua cara tersebut mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi terdapat perbedaan berdasarkan konsep perundang-undangan, dimana garis pemisahnya adalah antara melanggar undang-undang (*unlawful*) dan tidak melanggar undang-undang (*lawful*) (Mohammad Zain, 2007 : 49).

Penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Berkenaan dengan hal ini, untuk mengklasifikasikan penyelundupan pajak tersebut sesuai pasal 38 dan pasal 29 Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (IAI, 2017 : 90),

sehingga pengertian penyelundupan pajak tersebut selain kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya seperti melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya, pembayaran dengan cek kosong, juga termasuk tidak dapat memenuhi kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan, tidak dapat memenuhi kewajiban pengisian surat pemberitahuan dengan benar dan lengkap, tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan dan pencatatan termasuk tidak dapat memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan, pencatatan, dan dokumen lainnya, tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak-pajak yang telah dipotong atau yang telah dipungut dan tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) (Mohammad Zain, 2007: 51). Sementara itu, penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Strategi perencanaan pajak bisa meliputi pemilihan alternatif pengenaan tarif pajak, menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak, pemilihan Bentuk Usaha yang tepat dan pemilihan metode yang sesuai dengan perpajakan (Muhammad Zain, 2007 : 65).

Berdasarkan hal tersebut sampel yang digunakan dalam penelitian ini tidak termasuk kedalam klasifikasi yang menunjukkan perbuatan penyelundupan pajak (*tax evasion*), tetapi dapat diindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan melalui kebijakan pendanaan yaitu

kebijakan *Leverage*, dimana penambahan utang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga yang timbul atas utang tersebut dapat menjadi pengurang laba bersih perusahaan karena beban bunga dapat dibiayakan menurut pajak. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap dan metode penyusutan merupakan strategi yang dapat digunakan untuk penghindaran pajak karena beban depresiasi yang melekat pada aset tetap akan menjadi pengurang pajak, besarnya beban depresiasi dapat ditentukan berdasarkan metode yang telah ditetapkan oleh perpajakan yaitu menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*)(Hormati , 2009 dalam Marfu'ah, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Moses dan Nur (2017) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *leverage* dalam suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) yang menyatakan bahwa *Leverage* yang diproksikan dengan Debt Ratio (DR) berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak yang dilakukan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* dan intensitas aset tetap akan menyebabkan menurunnya tingkat *tax avoidance*. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka tindakan *tax avoidance* akan tinggi..

Penelitian yang dilakukan oleh Rifka dan Dini (2016) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan. Ukuran Perusahaan (*Size*) berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan, perusahaan-perusahaan yang besar mempunyai sumber daya yang mencukupi untuk melakukan aktivitas perencanaan pajak dengan tujuan mendapatkan penghematan pajak yang optimal.

Keterkaitan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terdapat persamaan topik yaitu tentang *tax avoidance* atau penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, namun terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu seperti tahun pengamatan, variabel penelitian dan pengukuran variabel. Dimana penelitian terdahulu tahun pengamatannya selama 3 tahun dengan variabel penelitian menggunakan karakteristik perusahaan, *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan,

koneksi politik, profitabilitas, dan corporate governance dengan rata-rata pengukuran variabel *tax avoidance* hanya menggunakan ETR atau CETR sedangkan variabel *leverage* diukur menggunakan total utang dibagi total aset, sedangkan dalam penelitian ini tahun pengamatan hanya 1 tahun dengan pemilihan variabel dari penelitian terdahulu yang inkonsisten dan berpengaruh terhadap *tax avoidance* antara penelitian terdahulu di tahun 2016-2017 dengan pengukuran *tax avoidance* menggunakan dua pengukuran yaitu ETR dan CETR dan *leverage* diukur menggunakan DER.

B. Kajian Pustaka

1. Teori Keagenana

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori agensi adalah kontrak antara satu atau beberapa *principal* yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama mereka yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Dalam pendelegasian wewenang pemilik (*principal*) kepada manajer (*agent*), manajemen diberi hak untuk mengambil keputusan bisnis bagi kepentingan pemilik.

Teori keagenan juga mengimplikasikan adanya asimetri informasi (kesenjangan informasi) antara manajer sebagai pihak agen dan pemilik sebagai prinsipal. Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak

berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki sehingga munculah informasi asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*pricipal*) yang dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam hal kinerja perusahaan. Pemerintah (*pricipal*) dan wajib pajak (*agent*) memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal perpajakan. Bagi Pemerintah pajak adalah sumber penerimaan Negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi wajib pajak, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan sehingga wajib pajak berusaha meminimalisasi beban pajak sekecil mungkin dengan berbagai cara, mulai dari yang sesuai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan.

Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja perusahaan, salah satunya adalah kebijakan perusahaan mengenai pajak. Dimana sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetris informasi terhadap informasi pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak prinsipal (Amelia,2015).

2. Leverage

Leverage merupakan suatu rasio keuangan yang menunjukkan hubungan antara utang perusahaan dengan modal yang dimiliki perusahaan. Menurut Fahmi (2011:62) rasio *leverage* adalah untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Pengukuran dalam rasio keuangan leverage ini adalah dengan menggunakan presentase terhadap total utang dengan modal perusahaan yang disebut juga dengan *Debt to Equity Ratio*. DER merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang yang ada dengan menggunakan modal yang ada, semakin tinggi nilai ini tentunya semakin berisiko keuangan perusahaan tersebut.

Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi total utang (jangka pendek dan jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar. Meningkatnya beban terhadap kreditur menunjukkan sumber modal perusahaan sangat tergantung dengan pihak luar. Selain itu besarnya beban utang yang ditanggung perusahaan dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan.

Menurut Munawir (2010), utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Utang dapat dibedakan ke dalam utang lancar dan utang jangka panjang.

a. Utang Lancar adalah utang yang pelunasan atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Utang lancar meliputi:

- Utang dagang
- Utang wesel
- Utang pajak
- Biaya yang masih harus dibayar
- Utang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo
- Penghasilan yang diterima di muka

b. Utang Jangka Panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh tempo) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca). Utang jangka panjang meliputi :

- Utang obligasi
- Utang hipotik
- Pinjaman jangka panjang yang lain

3. Intensitas Aset Tetap

Aset adalah kekayaan yang mempunyai manfaat ekonomi berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dikuasai oleh yang berhak akibat transaksi (Nafarin,20017). Aset juga dapat menggambarkan ukuran perusahaan karena jumlah aset yang dimiliki perusahaan sebanding lurus dengan

ukuran perusahaan. Aset pada perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Aset Lancar dan Aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang memiliki manfaat dalam kurun waktu singkat atau sama dengan satu tahun. Contohnya seperti kas, piutang usaha, persediaan, surat berharga, perlengkapan, sewa dibayar dimuka sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang dimiliki perusahaan yang dapat dilihat dan diukur dengan jelas dan mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun. Contohnya seperti aset tetap, aset tidak berwujud.

Aset tetap dalam [akuntansi](#) adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Jenis [aset](#) tidak lancar ini biasanya dibeli untuk digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contoh aset tetap antara lain adalah [properti, bangunan, pabrik](#), alat-alat produksi, [mesin](#), kendaraan bermotor, furnitur, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain. Aset tetap biasanya memperoleh keringanan dalam perlakuan [pajak](#). Kecuali tanah atau lahan, aset tetap merupakan subyek dari [depresiasi](#) atau penyusutan.

Intensitas aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini

dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2014).

4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Menurut Poerwadarminta (1983;13) ukuran perusahaan diartikan sebagai berikut:

“(1) alat-alat untuk mengukur (seperti menjengkal dan sebagainya), (2) sesuatu yang dipakai untuk menentukan (menilai dan sebagainya), (3) pendapatan mengukur panjangnya (lebarnya, luasnya, besarnya) sesuatu”.

Jika pengertian ini dihubungkan dengan perusahaan atau organisasi, maka ukuran perusahaan (*organization size*) dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya usaha dari suatu perusahaan atau organisasi. Dengan demikian ukuran perusahaan merupakan sesuatu yang dapat mengukur atau menentukan nilai dari besar atau kecilnya perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks (Hormati, 2009 dalam Siregar & Widyawati, 2016).

Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada di negara lain, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya (Siregar & Widyawati, 2016).

5. Tax Avoidance (Penghindaran pajak)

Pengertian *tax avoidance* adalah upaya untuk meringankan beban pajak namun tidak melanggar Undang-Undang yang ada (Mardiasmo : 2003).

Pengertian *tax avoidance* adalah upaya efisiensi beban pajak yang harus dibayarkan dengan cara menghindari pengenaan pajak lewat berbagai jenis transaksi yang bukan merupakan objek pajak (Nur : 2010).

Tax avoidance adalah usaha untuk mengurangi, menghindari serta meringankan beban pajak dengan berbagai cara yang dimungkinkan oleh perundang-undangan perpajakan dengan memperhatikan ada atau tidaknya suatu akibat pajak yang ditimbulkannya (Ernest R. Mortenson dalam Zain : 2008).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha pengendalian penghindaran pajak dengan strategi yang tidak melanggar ketentuan peraturan undang-undang perpajakan yang dapat dilakukan secara legal dan aman oleh suatu perusahaan. . Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan

memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013).

C. Pengembangan Hipotesis

Kebijakan leverage merupakan salah satu kebijakan dalam hal pendanaan, dimana penambahan jumlah utang akan mengakibatkan timbulnya beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas utang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal (Dharma & Ardiana, 2016). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016), yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Semakin tinggi tingkat utang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016), yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi leverage akan menyebabkan menurunnya tingkat *tax avoidance*.

Hubungan *Leverage* terhadap *tax avoidance* dapat di hipotesiskan sebagai berikut:

H₁ : *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Intensitas kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi pembayaran pajak perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya

investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap mengenai perpajakan adalah dalam hal depresiasi dan metode penyusutan yang digunakan. Beban depresiasi yang melekat pada kepemilikan aset tetap akan memengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak sedangkan rata-rata metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan adalah saldo menurun karena dengan metode tersebut dapat menguntungkan perusahaan karena beban penyusutan yang ditanggung perusahaan tinggi sehingga dapat menekan beban pajak perusahaan. Laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi pajak terutang perusahaan (Mulyani, 2014). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016), yang menyatakan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas aset tetap akan menyebabkan menurunnya tingkat *tax avoidance*

Hubungan Intensitas Aset Tetap terhadap *tax avoidance* dapat di hipotesiskan sebagai berikut:

H₂ : intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar

ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi (Hormati, 2009 dalam Marfu'ah, 2015). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016), yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap *tax avoidance* dapat di hipotesiskan sebagai berikut:

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*

